

PENGATURAN APBDUS PUJON KIDUL KABUPATEN MALANG TAHUN 2022

Ginanjar Suendro
STIE Cendekia Karya Utama Semarang

Pengaturan Anggaran Perencanaan Pembangunan Dusun (APBDus) di Dusun Pujon Kidul, Kabupaten Malang, berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan Dusun Pujon Kidul dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Dusun Pujon Kidul melalui alokasi dana pembangunan Dusun Pujon Kidul, Kabupaten Malang. Desa ini memanfaatkan Badan Usaha Milik Dusun (BUMDus) dan unit usaha yang dikelola oleh masyarakat serta pemerintah Dusun Pujon Kidul, Kabupaten Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara responden. Tujuan penelitian ini mencakup memperlihatkan peran APBDus dalam meningkatkan kesejahteraan di Pujon Kidul, Kabupaten Malang melalui pembangunan Dusun, menunjukkan hasil yang telah terwujud dengan adanya APBDus untuk kesejahteraan di Pujon Kidul, Kabupaten Malang, dan membuktikan bahwa APBDus di Dusun Pujon Kidul, Kabupaten Malang, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan desa dan pemberdayaan dengan kebijakan aparatur Dusun Pujon Kidul, Kabupaten Malang

Kata Kunci: *APBDus, BUMDus, Aturan Administratif Dusun Pujon Kidul*

ABSTRACT

The Budget Planning for Village Development (APBDus) in Pujon Kidul Hamlet, Malang Regency, serves as a means to increase the revenue of Pujon Kidul Hamlet and also to improve the welfare of its residents through the allocation of development funds for Pujon Kidul Hamlet, Malang Regency. The village utilizes the Village-Owned Enterprises (BUMDus) and business units managed by the community and the government of Pujon Kidul Hamlet, Malang Regency. The research method employed is qualitative descriptive with data collection through respondent interviews. The objectives of this research include showcasing the role of APBDus in enhancing welfare in Pujon Kidul, Malang Regency, through hamlet development, demonstrating the achieved results with the existence of APBDus for the welfare in Pujon Kidul, Malang Regency, and proving that APBDus in Pujon Kidul Hamlet, Malang Regency, can improve the welfare of the community through village development and empowerment with the policies of the Pujon Kidul Hamlet apparatus, Malang Regency.

Keywords: *APBDus, BUMDus, The Administrative Rules of Pujon Kidul Hamlet*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dusun, sebagai entitas pemerintahan yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat, menjadi pusat perhatian utama dalam upaya pembangunan pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar wilayah di Indonesia terletak di daerah Dusun. Sesuai dengan UU No 6 TH 2014 tentang Dusun, tata kelola keuangan pemerintah desa diatur secara terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten

Proses penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Dusun (ADD) dilakukan secara bertahap, yakni sebesar 40% pada bulan Maret dan 60% pada bulan Juni. Pemberian ADD oleh Pemerintah Kabupaten Malang merupakan implementasi dari hak Dusun untuk menjalankan otonomi dalam upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan kondisi dan pertumbuhan Desa yang dipengaruhi oleh keberagaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kesatuan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pengalokasian ADD dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Dusun dan Perangkat Dusun, jumlah penduduk Desa, tingkat kemiskinan, luas wilayah Desa, serta tingkat kesulitan geografis Dusun. Jumlah ADD di Kabupaten Malang mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017, yakni dari Rp 178 miliar menjadi Rp 184 miliar, sebagaimana disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Malang. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan dana Dusun yang disalurkan oleh pemerintah pusat dari tahun ke tahun.

| Periode | Total Dusun | Penetapan Dasar | | Penetapan Formula | Total |
|---------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | Per Dusun | Per Kota | | |
| 2018 | 378 | 565.640 | 213.811.920 | 31.735.436 | 245.547.356 |
| 2019 | 378 | 720.442 | 272.327.076 | 40.652.661 | 312.979.737 |
| 2020 | 378 | 616.345 | 232.978.410 | 76.037.781 | 314.215.308 |
| 2021 | 378 | 672.421 | 254.175.284 | 111.652.306 | 365.827.590 |

Kutipan: Rincian Dana Dusun DJPK Lembaga Keuangan Pemerintah (Dalam Ribu Rupiah)

Jumlah ini masih tergolong kecil apabila dibandingkan dengan situasi yang ada di masyarakat Dusun Pujon Kidul. Dari segi lembaga dan kepemudaan, terdapat tingkat apatis yang cukup tinggi terhadap rencana pembangunan di Dusun. Kondisi ekonomi masyarakat juga menunjukkan tingkat rendah, disebabkan oleh kurangnya pemanfaatan Sumberdaya Alam dan minimnya upaya peningkatan Sumberdaya Manusia di Dusun Pujon Kidul. Oleh karena itu, fokus utama penelitian ini adalah pada *“Pengaturan APBDUS Pujon Kidul Kabupaten Malang Tahun 2022”*.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Dusun

Secara resmi, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 72 TH 2005 tentang Dusun sebagai landasan hukum yang dianggap penting bagi Dusun. Secara tegas, berdasarkan peraturan tersebut, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat. Ini didasarkan pada asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam kerangka Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dusun berperan sebagai pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, bertanggung jawab atas layanan publik, peraturan umum, dan pemberdayaan (Hehamahua, 2015)

APBDus

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 TH 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dusun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun, yang sering disebut APBDusun, merupakan perencanaan keuangan tahunan Pemerintahan Dusun. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 19 TH 2006 tentang Keuangan Dusun, APBDusun adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Dusun yang diperbincangkan dan disetujui bersama oleh Pemerintah Dusun dan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD), dan diresmikan melalui Peraturan Dusun.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis

Penelitian ini dilakukan di desa Pujon Kidul kecamatan Pujon kabupaten Malang. Dusun Pujon Kidul merupakan salah satu Dusun yang berada dalam wilayah kabupaten Malang. Dusun ini dalam segi geografis berada pada posisi 7°21'-7°31' lintang selatan dan 110°10'-111°40'.1 Desa Pujon Kidul sebagaimana terletak di kecamatan Pujon yang notabene termasuk daerah dengan dataran tinggi memiliki karakteristik wilayah berupa perbukitan dan pegunungan. Secara administratif Dusun Pujon Kidul dibatasi oleh beberapa Dusun yaitu sebelah utara berbatasan dengan Dusun Ngroto, sebelah selatan berbatasan dengan hutan Perhutani, sebelah barat berbatasan dengan Dusun Sukomulyo dan sebelah timur berbatasan dengan Dusun Pujon Lor.

Analisis SWOT

Kekuatan (Strenght)

- Adat Budaya dan Kearifan Lokal Masih Terjaga
- Daya Tarik Destinasi Café sawah yang bagus
- Mengoptimalkan area pertanian sebagai objek pariwisata

Kelemahan (Weakness)

- Keterbatasan Upaya Promosi
- Kendala dalam penyediaan area parkir

- Keterbatasan tenaga kerja yang ahli dibidang pariwisata

Peluang (Opportunity)

- Perkembangan Minat masyarakat Terhadap Pariwisata
- Evolusi media social
- Implementasi UU No 6 TH 2014 yang mengalokasikan Dana Desa sebesar 1,4 miliar per tahun untuk setiap desa

Ancaman (Treatment)

- Keberadaan destinasi wisata desa serupa yang terus maju
- Model atraksi wisata yang dapat dicontoh
- Kurangnya kesadaran wisatawan terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

1. Dana APBDes itu bertujuan salah satunya mensejahterakan desa Pujon Kidul kabupaten Malang dengan pengembangan potensi hasil daerah desa serta terus gencar memberikan pelatihan kepada masyarakat desa Pujon Kidul kabupaten Malang
2. Penerimaan APBDes yang diterima Pujon Kidul Kabupaten Malang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan tetapi dalam perhitungan anggaran APBDes mengalami minus sehingga perlu gencar mencari investor dalam maupun luar negeri untuk pengembangan Pujon Kidul Kabupaten Malang.

1. SARAN

1. Potensi wisata yang ada di Pujon Kidul Kabupaten Malang Lebih digiatkan lagi dalam hal promosi dan juga menggali lagi potensi wisatanya maupun UMKMnya yang ada di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang
2. Lebih digali lagi potensi-potensi yang dimiliki Pujon Kidul Kabupaten Malang secara maksimal seperti pengelolaan limbah sampah menjadi produk-produk menarik agar bisa lebih mensejahterakan masyarakat setempat atau potensi lainnya yang bisa digalakkan

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukriy dan Halim Abdul, 2004. “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus

- Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali”, Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI, 16-17 Oktober 2003, Surabaya.
- Annahar, 2017. Buku *Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Anwas, Oos M., *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung, Alfabeta, 2014.
- Erlina., Rambe, O.S., dan Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akruar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fajar, T. 2016. *Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Temuwuh dan Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul)*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Fozzard, Adrian. 2001. *The basic budgeting problem: Approaches to resource allocation in the public sector and their implications for pro-poor budgeting*. Center for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute (ODI). Working paper 147. Halim 2004:15
- Hasanah, S. (2017). IRIBAN DALAM EKONOMI KAMPUNGAN Studi Kasus di Desa Jambu, Mlonggo, Jepara. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 12(1), 28-41.
- Huruta, A. D., & Sasongko, G. 2017. Uang dan ruang yang berkelanjutan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 29(4), 212-222.
- Ita Ulumiyah, et. Al, 2018. Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 5.
- Karimah, Faizatul., Saleh, Chorul., Wanusmawatie. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4, Hal. 597-602.
- Keraf, A. Sonny. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik praktis riset komunikasi: disertai contoh praktis riset media, public relation, advertising, komunikasi organisaso, komunikasi pemasaran*. Jakarta: Kencana
- Kuswandro, Wawan Edi. 2016. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Partisipasi*. <https://www.researchgate.net/publication/311101048>
- Mahfudz. 2009. Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2009, 10-22
- Maulana, M. Indra. 2018. Peran Dana Desa Dalam MEmberdayakan MAsyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sinar